

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini akan membahas mengenai pergeseran dari teknokrasi ke diplomasi: implementasi Joint Crediting Mechanism (JCM) antara Thailand dan Jepang serta fungsi politik dari Measurement, Reporting, and Verification (MRV) dalam Hubungan Internasional. Isu ini menarik karena mencerminkan bagaimana instrumen teknis seperti MRV tidak hanya berperan sebagai alat pengukuran, tetapi juga memiliki dimensi politik yang mempengaruhi relasi antar negara. Dalam konteks JCM, kerja sama bilateral ini tidak hanya berkaitan dengan pengurangan emisi, tetapi juga mencerminkan diplomasi iklim dan pengaruh politik negara donor terhadap negara mitra. Dengan pendekatan ini, penelitian dipastikan memiliki kebaruan dalam isu dan kerangka analisis, serta berpotensi memberikan kontribusi akademis yang signifikan terhadap studi Hubungan Internasional, khususnya dalam dimensi politik lingkungan dan kerja sama teknis lintas negara.

Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan global paling mendesak di abad ke-21, memaksa komunitas internasional untuk mencari solusi kolaboratif yang efektif. Deklarasi Aksi Iklim dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) PBB, serta Perjanjian Paris (2015), menekankan urgensi pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Dalam konteks ini, kerja sama antara negara-negara maju (*Global North*) yang

memiliki keunggulan teknologi dan kapasitas finansial dengan negara-negara berkembang (*Global South*) yang rentan terhadap dampak perubahan iklim namun memiliki potensi besar untuk mitigasi menjadi krusial. Salah satu manifestasi konkret dari kerja sama ini adalah melalui mekanisme transfer teknologi dan pendanaan iklim. Berdasarkan laporan UNEP Emissions Gap Report 2023, dunia berada pada jalur kenaikan suhu sebesar 2,5–2,9°C pada akhir abad ini jika hanya mengandalkan kebijakan dan komitmen yang ada saat ini, menegaskan pentingnya mekanisme kolaboratif seperti JCM untuk mempersempit gap tersebut (UNEP 2023, 31).

Gambar 1 Mekanisme JCM



Sumber: (carbon-markets.env.go.jp 2024)

JCM merupakan salah satu skema bilateral yang diinisiasi oleh Jepang untuk memfasilitasi kerjasama teknologi rendah karbon dan investasi terkait iklim dengan negara-negara mitra, termasuk Thailand. Sejak diluncurkan, JCM bertujuan untuk mendukung upaya negara berkembang dalam mengurangi emisi GRK melalui implementasi teknologi canggih dari Jepang, sekaligus memungkinkan

Jepang untuk mengklaim sebagian kredit karbon yang dihasilkan sebagai kontribusi terhadap target pengurangan emisinya sendiri. Jepang menargetkan akumulasi pengurangan dan penghapusan emisi gas rumah kaca sebesar sekitar 100 juta ton CO₂ pada tahun fiskal 2030 (Ministry of the Environment Government of Japan 2024).

Demi mencapai target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (NDC), Jepang akan menghitung kredit karbon yang diperoleh secara cermat. Hingga Mei 2025, Jepang telah menjalin kerja sama dalam mekanisme JCM dengan 30 negara mitra, termasuk Mongolia, Bangladesh, Ethiopia, Kenya, Maladewa, Vietnam, Laos, Indonesia, Kosta Rika, Palau, Kamboja, Meksiko, Arab Saudi, Chile, Myanmar, Thailand, Filipina, Senegal, Tunisia, Azerbaijan, Moldova, Georgia, Sri Lanka, Uzbekistan, Papua Nugini, Uni Emirat Arab, Kirgistan, Kazakhstan, Ukraina dan Indonesia (Ministry of Foreign Affairs of Japan 2025). Menurut data dari JCM Sekretariat, hingga awal 2025 tercatat lebih dari 260 proyek JCM yang disetujui di seluruh negara mitra, termasuk lebih dari 50 proyek aktif di Thailand yang meliputi instalasi panel surya, sistem pendingin efisien, dan modernisasi pabrik industri berat (JCM 2025).

Thailand sendiri, kemitraan JCM dengan Jepang telah dimulai sejak tahun 2013, menghasilkan sejumlah proyek signifikan yang berfokus pada dekarbonisasi sektor industri dan energi. Pada tanggal 19 November 2015, Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Ms. Tamayo Marukawa, dan Menteri Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kerajaan Thailand, Jenderal Surasak Karnjanarat,

menandatangani dokumen bilateral terkait mekanisme JCM di Tokyo, Jepang. Penandatanganan ini menandai peluncuran resmi JCM di Thailand, yang menjadi negara mitra ke-16 setelah Mongolia, Bangladesh, Ethiopia, Kenya, Maladewa, Vietnam, Laos, Indonesia, Kosta Rika, Palau, Kamboja, Meksiko, Arab Saudi, Cile, dan Myanmar (JCM 2015).

Inti dari operasionalisasi dan akuntabilitas JCM, sebagaimana mekanisme iklim lainnya, terletak pada sistem MRV. Pada awalnya, MRV dirancang dan dipandang sebagai sebuah proses teknokratis yang objektif, bertujuan untuk memastikan transparansi, akurasi, dan kredibilitas dari pengurangan emisi yang diklaim. Fungsi utamanya adalah menyediakan data dan informasi yang valid mengenai dampak implementasi proyek, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pihak donor, penerima, maupun komunitas internasional.

Proses MRV melibatkan serangkaian prosedur standar, metodologi perhitungan yang disepakati, serta verifikasi oleh pihak ketiga yang independen. Namun demikian, penelitian ini berargumen bahwa di balik teknokratisnya, implementasi MRV dalam kerangka JCM sarat dengan dimensi dan kepentingan politik yang kompleks. Pertama, MRV berfungsi sebagai instrumen legitimasi. Bagi Jepang sebagai negara donor, keberhasilan MRV dalam menunjukkan hasil nyata proyek JCM meningkatkan citra internasionalnya sebagai pemimpin dalam teknologi hijau dan mitra pembangunan yang bertanggung jawab.

Bagi Thailand sebagai negara penerima, MRV yang kredibel dapat meningkatkan daya tarik investasi hijau lebih lanjut dan memperkuat komitmen

nasionalnya terhadap aksi iklim. Kedua, proses MRV dapat dipengaruhi oleh dinamika *donor-driven*, di mana negara donor memiliki pengaruh signifikan dalam penentuan metodologi, standar, dan bahkan fokus area proyek yang diprioritaskan, yang mungkin tidak selalu selaras sepenuhnya dengan prioritas pembangunan berkelanjutan negara penerima. Ketiga, akses dan kontrol terhadap informasi yang dihasilkan melalui MRV itu sendiri menjadi sebuah arena politik. Kepemilikan data, transparansi pelaporan, dan interpretasi hasil dapat dinegosiasikan dan dipengaruhi oleh kepentingan masing-masing pihak, yang pada gilirannya berdampak pada pemberian kredit karbon dan narasi keberhasilan proyek.

Penelitian ini menjadi penting dalam studi Hubungan Internasional karena berupaya membongkar dimensi politik yang seringkali tersembunyi di balik instrumen teknis dalam kerja sama internasional. Dengan menganalisis implementasi JCM Thailand-Jepang dan fungsi politik MRV, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mekanisme yang tampak netral dan teknis dapat menjadi arena negosiasi kepentingan, pelaksanaan kekuasaan (*soft power*), dan pencapaian tujuan diplomatik bagi negara-negara yang terlibat. Lebih lanjut, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang dinamika hubungan Utara-Selatan dalam tata kelola iklim global, efektivitas mekanisme pasar karbon bilateral, serta tantangan dalam mencapai keadilan iklim ketika aspek teknis dan politis saling berkelindan.

Studi ini juga relevan untuk mengeksplorasi bagaimana norma dan praktik internasional dalam isu perubahan iklim dibentuk dan dinegosiasikan melalui

interaksi bilateral, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi arsitektur kerjasama iklim multilateral yang lebih luas.

1.2 Rumusan Masalah

Mekanisme JCM antara Thailand dan Jepang, yang bertujuan untuk pengurangan emisi dan transfer teknologi rendah karbon, menjadi contoh bagaimana kerja sama teknis dalam isu perubahan iklim juga sarat dengan dimensi politik. Sistem MRV, yang esensial untuk akuntabilitas JCM dan awalnya dirancang sebagai instrumen teknokratis objektif, dalam praktiknya menunjukkan fungsi politik yang signifikan. Fungsi politik ini mencakup perannya sebagai alat legitimasi bagi negara donor dan penerima, potensi dipengaruhi oleh agenda negara donor (*donor-driven*), serta menjadi arena negosiasi terkait akses dan kontrol informasi.

Pergeseran dari aspek teknokratis ke fungsi diplomasi dan politik dalam implementasi JCM dan MRV ini menunjukkan adanya kompleksitas yang memerlukan analisis lebih mendalam untuk memahami dinamika Hubungan Internasional di baliknya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, diangkatlah satu pertanyaan penelitian. Pertanyaan yang diangkat dalam rumusan masalah ini adalah **“Bagaimana proses teknokrasi ke diplomasi JCM Thailand-Jepang dilakukan melalui sistem MRV?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diangkat oleh peneliti, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi JCM Thailand-Jepang dilakukan melalui sistem MRV

1.4 Manfaat Penelitian

Pada bagian ini berisikan uraian mengenai kontribusi yang diberikan penelitian ini. Kontribusi yang diberikan merupakan manfaat, baik secara akademis maupun secara praktis. Berikut adalah manfaat yang didapat secara akademis maupun praktis:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian ilmu Hubungan Internasional, khususnya terkait isu kerja sama lingkungan lintas batas dan politik ekonomi internasional. Secara khusus, penelitian ini juga memberikan manfaat dalam kajian Hubungan Internasional terkait analisis mekanisme bilateral seperti JCM antara Thailand dan Jepang, terutama dalam memahami bagaimana sistem MRV yang bersifat teknis dapat memiliki fungsi dan implikasi politik. Dengan demikian, pengetahuan terkait dimensi politik dalam instrumen kerja sama teknis dan tata kelola iklim global dapat dikaji dan dipahami lebih jauh. Penelitian ini juga berkontribusi pada studi mengenai dinamika hubungan Utara-Selatan dalam konteks diplomasi iklim dan transfer teknologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang dapat diperoleh secara praktis dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman mendalam bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam negosiasi dan implementasi kerjasama iklim bilateral, khususnya terkait efektivitas dan implikasi politik dari sistem MRV dalam JCM. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran publik dan para pemangku kepentingan mengenai kompleksitas di balik kerja sama internasional dalam isu perubahan iklim, mendorong diskusi yang lebih luas tentang transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam mekanisme pendanaan dan transfer teknologi iklim. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan, rujukan, maupun untuk dikutip guna memahami aspek teknis dan politis dari implementasi JCM, sehingga menjadi referensi berharga bagi kalangan akademisi seperti dosen dan mahasiswa yang mengkaji isu-isu serupa dalam kerja sama lingkungan internasional dan diplomasi iklim.

1.5 Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri atas lima bab, dalam setiap bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan konteks kerjasama JCM Thailand-Jepang dan signifikansi sistem MRV, rumusan masalah yang mengidentifikasi pergeseran dari aspek teknokratis ke fungsi politik MRV, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis. Bab ini juga akan

mencakup sistematika penelitian yang menguraikan struktur keseluruhan penelitian mengenai implementasi JCM Thailand-Jepang dan fungsi politik MRV dalam Hubungan Internasional.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang relevan mengenai konsep JCM, Measurement, Reporting, and Verification (MRV), diplomasi iklim, kerja sama internasional Utara-Selatan, dan teori-teori Hubungan Internasional yang dapat menjelaskan aspek politik dalam kerja sama teknis. Selanjutnya, akan dipaparkan kerangka pemikiran yang mengarahkan analisis terhadap fungsi politik MRV dalam implementasi JCM Thailand-Jepang. Terakhir, bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, termasuk pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data untuk menjawab rumusan masalah.

BAB III GAMBARAN UMUM KERJASAMA JCM THAILAND-JEPANG DAN PERAN SISTEM MRV

Bab ini mendepeluti dan menjelaskan secara umum mengenai konteks kerja sama bilateral antara Thailand dan Jepang dalam isu perubahan iklim. Ini mencakup profil singkat kerja sama kedua negara, latar belakang pembentukan dan JCM secara global dan khususnya antara Thailand-Jepang. Selain itu, akan diuraikan mengenai arsitektur dan mekanisme dasar sistem Measurement,

Reporting, and Verification (MRV) sebagaimana dirancang dalam JCM, serta perkembangan implementasinya dalam periode yang relevan

BAB IV IMPLEMENTASI JCM THAILAND-JEPANG DAN FUNGSI POLITIK MRV

Bab ini merupakan inti analisis penelitian yang mendepan penelitian dan menjelaskan secara mendalam mengenai implementasi JCM antara Thailand dan Jepang. Fokus utama adalah pada bagaimana sistem MRV, yang awalnya bersifat teknokratis, bergeser atau menunjukkan fungsi-fungsi politiknya. Analisis akan mencakup aspek-aspek seperti penggunaan MRV untuk legitimasi, dinamika donor-driven dalam penetapan standar dan metodologi, serta implikasi politik terkait akses dan kontrol informasi yang dihasilkan oleh MRV. Bab ini juga akan membahas capaian dan tantangan dalam implementasi JCM Thailand-Jepang dari perspektif politik MRV.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, yang menjawab rumusan masalah mengenai pergeseran dari teknokrasi ke diplomasi dalam implementasi JCM Thailand-Jepang dan fungsi politik MRV. Berdasarkan temuan tersebut, bab ini juga akan memberikan saran-saran yang relevan, baik untuk pengembangan studi akademis di bidang Hubungan Internasional

dan tata kelola iklim, maupun untuk praktik kerja sama internasional di masa depan.

